



di Bumi Lambung Ma

Graha

Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) PPRA LI Lemhannas RI

Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA turut memantau pelaksanaan Stud Strategis Dalam Negeri Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LI Lemhannas RI. Secara serentak SSDN diselenggarakan selama satu pekan, sejak tanggal 30 Juni s.d. 4 Juli 2014 ke empat tujuan daerah yaitu Provinsi Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Bangka Belitung, dan Kalimantan Selatan..... (selengkapnya ke hal. 10...)

Malam Perkenalan PPRA 51 dan PPRA 52, Bersatu dalam Perbedaan



Foto : Humas Lemhannas RI

Lemhannas RI mengadakan acara malam perkenalan (*welcome party*), dan *International Night* bagi peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 51 dan PPRA 52 tahun 2014 di gedung Dwi Warna Purwa. Kedua acara yang diselenggarakan dalam waktu yang berbeda ini dimaksudkan untuk menumbuhkan keakraban di antara sesama peserta baik pada PPRA 51 maupun PPRA 52, sekaligus pula untuk memperkenalkan kekayaan budaya dari para peserta yang berasal dari negara sahabat

Malam perkenalan dan *International Night* bagi peserta PPRA 51 yang berlangsung pada hari Selasa (10/6) menghadirkan peserta dari beberapa negara sahabat yaitu Algeria, Liberia, Myanmar, Malaysia, Srilangka, Thailand, Zimbabwe dan Timor Leste.

Sementara Malam perkenalan dan *International Night* bagi peserta PPRA 52 yang digelar sepekan berikutnya pada hari Selasa (17/6) juga menghadirkan peserta yang berasal dari mancanegara seperti Myanmar, Pakistan, Saudi Arabia, Zimbabwe, dan Singapura.

Dalam kedua acara yang berbeda waktu tersebut, namun Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Budi Susilo Soepandji dalam setiap kesempatannya mengajak seluruh undangan yang hadir untuk bersulang demi bersatu dalam perbedaan, persahabatan, perdamaian dunia, kebahagiaan, dan kesejahteraan.

Acara yang juga dirangkai dengan makan malam ini, menggelar pertunjukan lagu dan tarian tradisional. Dalam acara ini juga terdapat stan pameran yang menampilkan daya tarik budaya dari masing-masing peserta yang berasal dari negara sahabat.

DAFTAR ISI



2 Malam Internasional PPRA 51 dan PPRA 52, Bersatu Dalam Perbedaan



3 Kuliah Umum Gubernur Lemhannas RI di Universitas Brawijaya



3 Komisi I DPR RI Bahas Anggaran Lemhannas RI



4 Kunjungan Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang ke Lemhannas RI



4 Mencari Rumusan untuk Mewujudkan Sinergitas Pemerintah Daerah dan Pusat



5 Harmoni Dalam Keberagaman



6 Tidak Boleh Ada *Vacuum of Power* pada Jabatan Presiden



7 Bakti Sosial Lemhannas RI ke Pondok Pesantren Al-Qosimiyah, Tasikmalaya



8 Membahas Kesehatan Wanita dan Hukum Perkawinan bersama Perista Lemhannas RI



9 Peringatan Isra' Miraj Lemhannas RI



10 Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) PPRA LI Lemhannas RI



11 Talkshow Lemhannas RI di TVRI Banjarmasin



12 Menyiapkan Humas untuk Menyongsong Komunitas ASEAN 2015

REDAKSI

Pengarah :

Irjen Pol Boy Salamuddin, MA

Penanggung Jawab :

Laksma TNI E. Estu Prabowo, M.Sc.

Redaktur :

Ir. Yusita Pusparini, M.Sc

Penyunting/Editor :

Kolonel Laut (P) Maghoni.

Redaktur Pelaksana :

Trias Noverdi, S.S., Endah Heliana, S.Sos.,

Aditya Solehah S.Hum, Aska Leonardi, M. I. Kom,

Triana Rahmawaty, S.Hum.

Desain

Bambang Iman Aryanto, S.T.

Fotografer :

Suryadi, Dwi Jayanto

Sekretariat :

Linda Purnamasari S.Sos., Letkol Caj G.T. Situmorang,

Gatot, Indah Winarni.

Distribusi :

Letkol Inf. Sumurung, Lettu Cba Supriyono.

Alamat Redaksi :

Biro Humas Settama Lemhannas RI, Jl. Medan

Merdeka Selatan No. 10, Jakarta Pusat, 10110,

Telp. (021) 3832108, 3832109, Fax. (021) 3451926,

Website <http://www.lemhannas.go.id>

Kuliah Umum Gubernur Lemhannas RI di Universitas Brawijaya

Dalam rangka mewujudkan visi Lemhannas RI sebagai lembaga nasional yang bertaraf internasional, unggul dan terkemuka, Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. dengan didampingi oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat Laksma TNI E. Estu Prabowo, M. Sc., dan Kepala Biro Kerjasama Brigjen TNI Sudibyo, S.E. melakukan kunjungan ke Universitas Brawijaya Malang. Rombongan Lemhannas RI diterima oleh Rektor Universitas Brawijaya Prof. Dr. Ir. Yogi Sugito beserta jajarannya pada Senin (9/6), di Gedung Rektorat.

Dalam kunjungan tersebut, juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) sebagai bentuk perluasan kerjasama antara Lemhannas RI dengan Universitas Brawijaya. Kerjasama yang ditandatangani itu mencakup kerjasama bidang pendidikan penyiapan kader pimpinan tingkat nasional, penelitian dan pengkajian strategik, pemantapan nilai-nilai kebangsaan, pengukuran ketahanan nasional, dan pengabdian kepada masyarakat. Diharapkan, kerjasama yang dilakukan ini akan memberi nilai tambah (*added value*) bagi kedua belah pihak.

Usai penandatanganan nota kesepahaman, Budi Susilo Soepandji turut menyampaikan kuliah umum dihadapan mahasiswa/i dan segenap civitas akademika Universitas Brawijaya. Dalam kuliah umum tersebut, Budi Susilo Soepandji menekankan arti pentingnya



pemahaman akan geopolitik saat ini. Posisi geografis Indonesia yang sangat strategis, menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki *bargaining power* dan *bargaining position* strategis dalam percaturan dan hubungan antar bangsa, baik dalam lingkup kawasan maupun global.

Namun menurutnya, perubahan lingkungan strategis atas globalisasi yang berdampak pada keadaan wilayah antar negara menjadi seolah tanpa batas (*borderless*). Potensi ancaman kini tidak lagi dalam bentuk ancaman yang bersifat fisik, tetapi juga *asymmetric threat*/ancaman non fisik. Selain itu, dunia kini juga dihadapkan dengan perang yang dilakukan oleh pihak ketiga tanpa keterlibatan langsung pihak yang berkepentingan atau disebut *proxy war*. Untuk itu, negara harus melakukan upaya-upaya konstruksi wawasan kebangsaan sebagai "proyek bersama" (*common project*) bagi seluruh warganya yang harus dipahami, dimengerti dan didukung oleh seluruh anak bangsa tanpa terkecuali.

Komisi I DPR RI Bahas Anggaran Lemhannas RI

Adanya penurunan pagu indikatif tahun anggaran 2015 sampai berada jauh di bawah usulan yang diharapkan, dikhawatirkan akan menghambat pelaksanaan program-program strategis Lemhannas RI yang berdampak penurunan kinerja Lemhannas RI secara menyeluruh. Demikian diungkap oleh Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. dalam penjelasannya pada pertemuan dengan Komisi I DPR RI yang membahas Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) dan Rencana Kerja Pemerintah

Kementerian Negara/Lembaga tahun 2015.

Dalam kegiatan yang dilaksanakan pada Rabu (11/6), di Ruang Rapat Komisi I DPR RI Gd. Nusantara II Paripurna DPR RI Lt. 1 ini, Gubernur Lemhannas RI meminta dukungan dari Komisi I DPR RI untuk dapat memperjuangkan penambahan alokasi anggaran Lemhannas RI T.A. 2015 sampai dengan terpenuhinya kebutuhan pelaksanaan program kerja secara menyeluruh.

Penurunan pagu indikatif tersebut, sangat disayangkan, mengingat pada Senin (9/6) Lemhannas RI telah menerima laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2013 dari BPK RI dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Perlu dicatat, predikat ini adalah kali ke tujuh yang diterima oleh Lemhannas RI secara berturut-turut.

Setelah mendengar penjelasan dari Budi Susilo Soepandji, pimpinan sidang Komisi I DPR RI menyatakan bahwa mereka dapat memahami penjelasan Gubernur Lemhannas RI. Selanjutnya, Komisi I DPR RI akan memperhatikan kekurangan alokasi anggaran sebagaimana usulan yang disampaikan.



Kunjungan Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang ke Lemhannas RI

Lemhannas RI mendapat kunjungan rombongan mahasiswa Program Pasca Sarjana (S2) Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, pada hari Rabu (11/6). Rombongan yang terdiri dari 38 mahasiswa, 3 dosen, dan 3 staf ini diterima langsung oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Laksamana Pertama TNI E. Estu. Prabowo, M. Sc. di ruang Syailendra, Auditorium Mini Asta Gatra Lt. 3 Barat Lemhannas RI.

Dr. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M. Hum., selaku ketua rombongan mengatakan kunjungan tersebut merupakan program Kuliah Kerja Lapangan (KKL) yang bertujuan untuk mengenalkan lembaga pemerintah yang terkait materi pendidikan agar para mahasiswa dapat mengenal dan memahami peran dan tugas dari profesi-profesi strategis yang berkaitan langsung dengan hukum, seperti jaksa, penyidik, dan penuntut dalam perkara hukum. KKL ini juga berfungsi untuk melihat implementasi teori hukum yang telah dipelajari dalam kelas kuliahnya dalam praktisnya di berbagai lembaga.

Dalam kunjungan ini, diisi pula pemberian materi hukum dengan tema **"Problematika Penegakan Hukum di Indonesia"** yang disampaikan oleh Irjen Pol Dr. H. M. Said Saile, M. Si. yang merupakan Tenaga Pengajar Bidang Hukum di Lemhannas RI. Menurut Said Saile, ada beberapa tantangan penegakan



hukum di Indonesia, diantaranya adalah lemahnya *political will* dan *political action* pimpinan untuk menjadikan hukum sebagai panglima, timpangnya peraturan perundang-undangan yang lebih merefleksikan kepentingan penguasa dibandingkan kepentingan rakyat kecil, serta rendahnya integritas, kredibilitas, profesionalitas, dan kesadaran hukum. Usai pemberian materi, dilanjutkan sesi tanya-jawab. Kunjungan diakhiri dengan saling bertukar cinderamata, dan berfoto bersama.

Mencari Rumusan untuk Mewujudkan Sinergitas Pemerintah Daerah dan Pusat

Masih rendahnya sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah terjadi mengakibatkan beberapa hal, seperti sulitnya menyamakan persepsi pembangunan yang sedang dijalankan, dan adanya kesenjangan pembangunan antar daerah yang mengakibatkan timbulnya perbedaan kesejahteraan masyarakat pedesaan dengan perkotaan. Demikian yang disampaikan oleh Prof. Dr. Ir. Dadan Umar Daihani, DEA, selaku wakil tim penyusun ketika memberikan penjelasan singkatnya.

Hal tersebut dikatakannya dalam *roundtable discussion* yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Pengkajian Strategik, Direktorat Pengkajian Politik Lemhannas RI dengan tema **"Optimalisasi Tata Kelola Pemerintahan melalui Penguatan Hubungan Pusat dan Daerah Guna Memperkokoh Stabilitas Nasional"** pada hari Kamis (12/6).

Dalam diskusi tersebut juga dijelaskan tentang iklim investasi daerah yang belum kondusif karena adanya keterbatasan infrastruktur sehingga turut menjadi tantangan otonomi daerah saat ini. *Roundtable discussion* yang diadakan di Ruang Kresna

Gd. Asta Gatra Lt. 4 ini dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. yang didampingi oleh Irjen Pol Boy Salamuddin selaku Deputi Pengkajian Strategik.

Acara kajian politik ini, juga mengundang empat pembicara untuk memaparkan pemikiran dan temuan-temuan yang terkait dengan tema. Pembicara tersebut antara lain Ketua Lembaga



Administrasi Negara Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA., Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI Dr. Boediarso Teguh Widodo, ME., Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otda Bappenas RI Dr. Ir. Imron Bulkin, MRP., dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan H. Mukti.

Dalam diskusi hadir pula penanggap yang berasal dari

berbagai latar belakang, yakni Ketua Pansus RUU Pemda DPR RI Drs. H. Akhmad Muqowam, Pengamat Politik UI Dr. Boni Hargens, Tenaga Profesional Bidang Pemdagri/Sismennas Lemhannas RI Dr. Kausar AS, M. Si., dan Taprof Bidang Poldagri Lemhannas RI Dr. Siti Nurbaya Bakar M. Sc.

Harmoni Dalam Keberagaman



Biro Humas Settama Lemhannas RI bekerja sama dengan TVRI dan RRI Kupang, menggelar dua kegiatan talkshow pada hari Senin, (16/6). Kegiatan ini merupakan rangkaian kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Tokoh Masyarakat Kupang, Nusa Tenggara Timur.

Kedua Talkshow ini, mengangkat tema “Harmoni Dalam Keberagaman”. Istilah “Floba Mora” lah yang menjadi alasan mengangkat tema tersebut karena Nusa Tenggara Timur dikenal sebagai daerah yang damai, indah dan harmonis. Selain itu juga, provinsi tersebut berbatasan langsung dengan Timor Leste dan Australia yang membuat NTT menjadi salah satu serambi terdepan Indonesia.

Talkshow yang diselenggarakan di RRI Kupang menghadirkan Tenaga Profesional Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Sistem Manajemen Nasional Lemhannas RI, Mayjen TNI (Purn) S.H.M. Lerrick, Sekretaris MUI Provinsi NTT Drs. Adam Asyrakal, Sekretaris Sinode Gereja Masehi Injili Timor (GMIT) Benyamin Naralulu dan Komandan Korem 161 Brigjen TNI Achmad Yulianto. Diskusi yang dimoderatori oleh penyiar RRI Kupang Ekleo Pasleo, juga menghadirkan peserta kegiatan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan di Kupang, Pendeta Boy Takoy dan Ernest Ludji.

Pada acara ini, Mayjen TNI (Purn) S.H.M. Lerrick mengkhawatirkan nilai-nilai kebangsaan yang hidup ditengah sosial masyarakat mulai luntur akibat dinamika globalisasi yang sangat cepat. “Bukan tidak mungkin Pancasila, ke depan tidak dihafal oleh anak muda,” tambahnya.

Sementara Adam Asyrakal, Sekretaris MUI Provinsi NTT menilai, bahwa pada hakikinya semua agama mengajarkan kita untuk saling mengasihi dan menyayangi. Untuk itu, tidak dibenarkan melukai dan menyakiti, meskipun mereka berbeda dari kita. “Perbedaan

dan keberagaman adalah berkah dari Tuhan YME,” ucap Benyamin Naralulu yang sependapat dengan penilaian Adam.

Sementara dalam Talkshow yang digelar oleh TVRI Kupang pada hari yang sama, juga mengangkat tema yang sama. Acara ini dimoderatori oleh penyiar TVRI Kupang Bebi Nailius menghadirkan sebagai narasumber Tenaga Profesional Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Sistem Manajemen Nasional Lemhannas RI Mayjen TNI (Purn) S.H.M. Lerrick, Benyamin Naralulu selaku Sekretaris Sinode Gereja Masehi Injili Timor (GMIT), Sisilia Sona Kaban yang mewakili Kesbangpol Provinsi NTT dan Ansgerius Takalapeta selaku tokoh masyarakat Kupang.

“Budaya bangsa Indonesia adalah identitas dan jati diri yang harus dipegang oleh masyarakat,” kata Benyamin Naralulu. Ia menambahkan bahwa perbedaan yang sangat beragam di Nusa Tenggara Timur merupakan anugerah Tuhan YME, bagai pelangi indah karena keragaman warnanya. “Untuk itu, pemuda perlu diingatkan lagi mengenai proses sejarah panjang pembentukan Indonesia, termasuk peningkatan kapasitas Lemhannas dalam menyebarkan empat konsensus dasar nasional,” kata Ansgerius. Namun di sisi lain, ia merasa prihatin atas tingginya jumlah pemuda di perbatasan yang meninggalkan daerahnya untuk bekerja di luar negeri tetapi kurang memiliki kemampuan yang memadai.

Pemuka agama dan masyarakat di NTT telah berupaya keras memberikan pemahaman dan pendidikan agama terkait dengan wawasan kebangsaan. Ansgerius Takalapeta menyoroti pemuda saat ini mulai lupa terhadap proses kesejarahan Indonesia. Oleh karenanya, melalui talkshow di TVRI Kupang ini tentang Nilai-Nilai Kebangsaan, diharapkan dapat menguatkan kembali pemahaman wawasan kebangsaan bagi masyarakat.



Tidak Boleh Ada *Vacuum of Power* pada Jabatan Presiden

Dinamika politik yang berkembang dewasa ini terkait dengan pemilihan presiden pada 9 Juli akan memunculkan beberapa kemungkinan peristiwa yang akan terjadi. Banyak pengamat politik yang menganalisa kemungkinan terjadinya kekosongan kekuasaan eksekutif terkait penetapan presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum dengan berakhirnya masa jabatan presiden dan wakil presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono pada 20 Oktober 2014.

Menyikapi hal tersebut, Lemhannas RI menyelenggarakan diskusi panel “Tinjauan Ketatanegaraan Terkait Kekosongan Kekuasaan Eksekutif” pada hari Kamis (19/6) di Ruang Kresna, Gd. Astagatra Lt. IV Barat. Acara ini menghadirkan beberapa pakar hukum ketatanegaraan diantaranya adalah Prof. Dr. Gayus Lumbun yang merupakan Hakim Agung MA, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, SH, MM, Praktisi Hukum Refly Harun, SH, MH, LLM dan Kepala Biro Hukum Setjen Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nur Syarifah, SH, LLM, (mewakili ketua KPU). Dalam diskusi yang dipandu moderator Dr. Siti Nurbaya Bakar ini, hadir sebagai penanggap adalah Prof. Djohermansyah Djohan (mewakili Kemendagri RI), Y. Kristianto Legowo (mewakili Kemenlu RI), dan Irjen Pol Drs. Drajat Tirtayasa, SH, MM (mewakili BIN).

Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA yang membuka acara tersebut mengatakan ada tiga permasalahan yang akan dibahas dalam diskusi tersebut, yaitu bagaimana jika sampai pada tanggal 20 Oktober 2014, pukul 24.00 WIB disaat berakhirnya masa jabatan presiden dan wakil presiden belum ada penggantinya? Antisipasi seperti apa bila terjadi kekosongan

kekuasaan eksekutif? dan Bagaimana bila ditinjau dari hukum ketatanegaraan?

“Untuk menyelamatkan jalannya roda pemerintahan, kita harus mendapatkan solusi dan payung hukum konstistusional yang berisi protokol mengenai siapa yang mendapatkan otoritas dalam memulihkan kondisi atas kekosongan kekuasaan eksekutif yang terjadi,” kata Budi Susilo Soepandji.

Kekosongan hukum dalam konstitusi dapat diisi dengan konvensi ketatanegaraan yang menjadi praktek dan memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan. “Konvensi ketatanegaraan bukan saja berfungsi melengkapi kaidah-kaidah hukum ketatanegaraan yang ada, melainkan untuk menjadikan kaidah hukum terutama Undang-Undang Dasar (UUD) dapat berjalan sesuai dengan perkembangan masa”, jelas Gayus Lumbun.

Menguatkan penjelasan Gayus Lumbun, Jimly Asshidiqie selaku Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu juga membenarkan bahwa tidak boleh ada kekosongan kekuasaan. Menurut Jimly dalam memahami undang-undang bukan hanya secara gramatikal, tetapi perlu memahami apa makna dan suasana kebatinan dari ide dasar yang melatarbelakangi tiap-tiap pasal dalam undang-undang tersebut.

Diharapkan dengan dilaksanakannya diskusi panel ini dapat memecahkan solusi guna mengantisipasi berbagai kemungkinan yang terjadi saat pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden sampai pada penetapan dan pelantikannya hingga kemungkinan terjadinya kekosongan kekuasaan eksekutif akibat dinamika politik yang terjadi.

Bakti Sosial Lemhannas RI ke Pondok Pesantren Al-Qosimiyyah, Tasikmalaya

Lemhannas RI bekerja sama dengan Komando Operasi Angkatan Udara I mengadakan kegiatan bakti sosial dalam rangka memperingati ulang tahun ke-49 Lemhannas RI, dan hari jadi ke-63 Komando Operasi Angkatan Udara I yang bertempat di Pondok Pesantren Al-Qosimiyyah Kampung Elos 03/05 Desa Karangmulya Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan yang dimulai pukul 09.00 WIB pada Sabtu (21/6) ini meliputi khitanan massal, serta pengobatan gratis bagi masyarakat sekitar pesantren tersebut. Pejabat Lemhannas RI yang hadir pada kegiatan ini adalah Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Budi Susilo Soepandji D.E.A., Wakil Gubernur Lemhannas RI, Marsekal Madya TNI H. Dede Rusamsi, SE, Kepala Biro Humas Lemhannas RI, Laksamana Pertama TNI E. Estu Prabowo, juga Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Lemhannas RI, Marsekal Pertama TNI Yoyok YS.

Dalam kegiatan tersebut, Prof. Dr. Budi Susilo Soepandji D.E.A. mengatakan Lemhannas RI memiliki kesamaan dengan Komando Operasi Angkatan Udara, yakni dibentuk untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara Indonesia. Namun yang membedakan adalah Komando Operasi Angkatan Udara menjaga secara fisik, sedangkan Lemhannas RI menjaga secara ideologi.

Adapun pejabat yang hadir mewakili Komando Operasi Angkatan Udara I adalah Kepala Staf Komando Operasi Angkatan Udara I, Marsekal Pertama TNI Dedy Nita Komara SE, serta Komandan Pangkalan Udara Wiriadinata, Letkol Pnb. Herdy Arief B., SE.

Total warga yang datang pada bakti sosial ini berjumlah 502 orang, dengan rincian sebanyak 433 orang warga memeriksakan kesehatannya, 24 orang warga berobat ke poli gigi, 21 orang ibu berkonsultasi ke poli KB, serta 24 orang anak dikhitan secara gratis. Kegiatan ini turut didukung pula oleh Kelompok Bakti Sosial Pengusaha, yang menyediakan berbagai jenis obat-obatan gratis.

Turut hadir perwakilan dari Pemda Tasikmalaya Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan Pemerintah Daerah Tasikmalaya, Asep Saiful Bahri, Kapolresta Tasikmalaya, AKBP drs. Novan Widyayoko SH. MH., dan Ketua Yayasan Al-Qosimiyyah, Ayi Al-Amin.

Nuraini (37) seorang warga sekitar pesantren yang datang bersama anaknya, mengungkapkan rasa senangnya karena dapat berobat gratis di kegiatan bakti sosial tersebut. Selanjutnya, dia pun berharap agar bakti sosial di Pesantren Al-Qosimiyyah dapat diadakan kembali, karena warga sekitar pesantren sangat terbantu dengan adanya kegiatan semacam ini.



Foto : Humas Lemhannas RI



Foto : Humas Lemhannas RI



Foto : Humas Lemhannas RI

Membahas Kesehatan Wanita dan Hukum Perkawinan bersama Perista Lemhannas RI



Foto : Humas Lemhannas RI

Infeksi saluran kemih disebabkan oleh adanya koloni kuman yang bersarang di saluran kemih. Bila kuman yang berkumpul di saluran kemih ini tidak langsung ditangani, kuman dapat masuk ke dalam darah dan menyebabkan gangguan ginjal. Penjelasan ini terungkap dalam pertemuan triwulanan Persatuan Istri Anggota Lemhannas RI (Perista) pada Rabu (25/6).

Kegiatan yang dilaksanakan di Gd. Dwi Warna Purwa tersebut dibuka oleh Hera Soepandji, yang menyatakan kebahagiaannya atas antusiasme anggota Perista, serta rasa terima kasihnya kepada panitia sehingga acara ini dapat terselenggara.

Pada kesempatan kali ini, Perista juga mengundang dua orang pembicara sekaligus, yaitu dr. Harrina Rahardjo, SpU., PhD., yang merupakan dokter Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, dan Dr. Diah Sulistyani Muladi, S.H., C.N., M.Hum., yang merupakan notaris sekaligus Alumni PPSA 17 Lemhannas RI.

Tema yang diangkat oleh dr. Harrina Rahardjo dalam kegiatan ini adalah "Infeksi Saluran Kemih pada Wanita." Dokter Harrina juga memberikan penjelasan mengenai penyebab-penyebab dan cara pencegahan infeksi yang rentan dialami oleh wanita.

Setelah penjelasan mengenai kesehatan, pembicara kedua, Diah Sulistyani, menyampaikan materi yang mengangkat tema

"Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Menurut UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974".

Dalam penyampaian materi yang kedua, dijelaskan mengenai harta bersama yang merupakan hak milik suami dan istri selama masa perkawinan, hal ini ternyata dapat menjadi masalah dalam situasi tertentu, misalnya perceraian, utang-piutang, hingga kasus korupsi. Untuk menghindari polemik yang ditimbulkan atas kepemilikan harta benda pada pasangan suami istri, Diah Sulistyani menyarankan agar dibuat perjanjian pernikahan sebelum menikah yang mengatur kepemilikan harta benda kedua belah pihak (suami dan istri).

"Saya melihat banyak etnis Tionghoa yang melakukan ini (perjanjian pernikahan) sebelum pernikahan, tetapi tampaknya cara seperti ini masih dianggap tabu untuk dilakukan masyarakat Indonesia. Padahal, sebagai notaris, saya melihat bahwa perjanjian ini akan sangat berguna saat ada masalah dalam rumah tangga," ujar Diah Sulistyani.

Peserta yang hadir di acara ini juga dapat memeriksakan kesehatan saluran kemihnya melalui pemeriksaan urine gratis oleh staf RSCM Jakarta yang membuka stan di acara tersebut.

Peringatan Isra' Miraj Lemhannas RI

Memperingati peristiwa Isra' Miraj Nabi Muhammad SAW, Lembaga Ketahanan Nasional RI mengadakan peringatan dengan tema "Dengan Memperingati Isra' Miraj Nabi Muhammad SAW, Kita Kokohkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa."

Dalam sambutannya, Budi Susilo Soepandji mengatakan bahwa tema peringatan Isra' Miraj ini sangat relevan dengan kondisi Indonesia sekarang. Dampak Pemilihan umum Presiden yang akan dilaksanakan pada 9 Juli mendatang, telah membentuk kelompok simpatisan fanatik yang berpotensi mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan adanya peringatan peristiwa Isra Miraj ini, diharapkan dapat menyadarkan kita bahwa meskipun pilihan berbeda, namun tetap terpelihara semangat menjunjung tinggi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Acara yang diselenggarakan di Ruang Gadjah Mada Gd. Panca Gatra Lt. 5 pada hari Selasa (24/6), dibuka oleh Gubernur Lemhannas RI Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, D.E.A. dan turut dihadiri pula oleh Wakil Gubernur Marsdya TNI Dede Rusamsi, S.E., perwakilan peserta PPRA ke - 51, PPRA ke - 52 dan P3DA 8 serta segenap anggota Lemhannas RI.

Sebagai pembukaan acara sebelum memasuki ceramah, PNS Warno Herliyanto membacakan potongan ayat dari Alquran Surat yaitu Al-Israa ayat 1-3 yang berisi tentang peristiwa Isra' dan Miraj yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan sari tilawah dibawakan oleh PNS Egy Vashti Puspasari.

Drs. KH. Ahmad Sofwan Nizamie selaku penceramah dalam acara ini menyampaikan arti peristiwa Isra' Miraj, yang merupakan peristiwa turunnya perintah salat bagi umat Islam. Dijelaskan pula bahwa, salat mempunyai banyak sekali keutamaan dalam kehidupan ini, bukan hanya

keutamaan yang berdampak pada kehidupan akhirat, tetapi juga dampak yang langsung dapat dirasakan manusia di dunia.

"Salah satu keuntungan salat diperoleh dari gerakannya, yakni sujud. Setelah diteliti oleh para ilmuwan, ternyata pada saat sujud darah dapat mengalir bagian otak yang pada posisi biasa (berdiri, duduk, maupun tidur) tidak mendapat pasokan darah. Pasokan darah ke bagian otak tersebut tentunya akan mengoptimalkan kerja otak kita, dibanding yang tidak biasa bersujud," ujar Ahmad Sofwan Nizamie.

Acara ini ditutup dengan penyerahan cinderamata dari Lemhannas RI oleh Gubernur kepada penceramah, Drs. KH. Ahmad Sofwan Nizamie.



Foto : Humas Lemhannas RI



Foto : Humas Lemhannas RI

Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) PPRA LI Lemhannas RI



Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LI Lemhannas RI, secara serentak melaksanakan Kegiatan Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) selama satu pekan, sejak tanggal 30 Juni s.d. 4 Juli 2014. Tujuan SSDN PPRA LI Lemhannas RI mencakup empat daerah yaitu Provinsi Jawa Barat, Sulawesi Tenggara, Bangka Belitung, dan Kalimantan Selatan.

SSDN sendiri merupakan sebuah metode pembelajaran dengan pendalaman materi melalui peninjauan langsung ke daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) yang melibatkan unsur pemerintahan, tokoh masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya, serta peminjaman atas objek/produk strategis dan unggulan dari suatu daerah/provinsi tujuan. Selain itu, SSDN bertujuan untuk memberi kesempatan kepada para peserta PPRA LI untuk mengenal sekaligus melihat secara langsung kondisi kehidupan sosial serta peningkatan pembangunan di daerah tujuan. Temuan data akan diolah di Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional (Labkurtannas) yang dimiliki oleh Lemhannas RI dan hasilnya dapat digunakan sebagai indikator Ketahanan Nasional Indonesia.

Dalam kunjungan SSDN ke Jawa Barat, rombongan peserta SSDN PPRA LI Lemhannas RI melakukan kunjungan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jawa Barat, Kodam III/Siliwangi, Polda Jawa Barat, Universitas Padjajaran, PT. Pindad, Pemerintah Kabupaten Purwakarta, DPRD Kabupaten Purwakarta, Perum Jasa Tirta II dan Lokasi Waduk - Bendungan

Jatiluhur.

Sementara di Provinsi Sulawesi Tenggara yang juga menjadi salah satu tujuan SSDN PPRA LI Lemhannas RI, rombongan SSDN melakukan kunjungan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Polda Sulawesi Tenggara, DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Kabupaten Kolaka, DPRD Kabupaten Kolaka, PT. Antam - Kolaka, Pemerintah Kota Kendari, Universitas Haluoleo, Kodam VII/Wirabuana dan Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari.

Sedangkan rombongan SSDN PPRA LI Lemhannas RI yang bertujuan ke Provinsi Bangka Belitung, melakukan kunjungan ke Pemerintah Provinsi Bangka Belitung, DPRD Provinsi Bangka Belitung, Polda Bangka Belitung, Pemerintah Kota Pangkal Pinang,





Talkshow Lemhannas RI di TVRI Banjarmasin

“Ketahanan nasional dan kebangsaan adalah dua hal yang saling kait-mengkait, hal itu tak lepas dari kesejarahan Indonesia yang telah membuktikan bahwa bangsa Indonesia disatukan oleh falsafat kebangsaan, *Bhinneka Tunggal Ika*,” kata Gubernur Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Budi Susilo Soepandji, DEA. Diskusi tersebut mengemuka dalam *Talkshow* yang diselenggarakan TVRI Banjarmasin, Kalimantan Selatan (1/7).

Dalam diskusi yang dimoderatori oleh Ketua PWI Provinsi Kalimantan Selatan, Faturrahman, hadir narasumber antara lain Gubernur Kalimantan Selatan Drs. H. Rudy Ariffin, MBA, Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Ekonomi Lemhannas RI, Prof. Dr. Miyasto, S.U., Pembantu Rektor I Universitas Lambung Mangkurat Prof. Dr. HM. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum., dan Bupati Banjar, H. Pangeran Khairul Saleh.

“Perspektif Ketahanan Nasional, melihat wilayah Indonesia secara menyeluruh dari berbagai aspek, yakni Astagatra. Permasalahan Ketahanan Nasional yang dihadapi saat ini sangat dinamis, kompleks dan sangat dipengaruhi oleh ketahanan provinsi, bahkan hingga tingkat kabupaten,” ucap Budi Susilo Soepandji.

Globalisasi kini merambah masuk ke kehidupan bermasyarakat, dapat memberikan dampak negatif terhadap menurunnya kualitas jati diri bangsa, lunturnya nasionalisme dan meningkatnya primordialisme. “Indonesia juga dihadapkan dengan hubungan antara pusat dan daerah yang kurang sejalan, karena masih ada ego atas nama pribadi dan kelompok, korupsi, juga eksploitasi kekayaan alam yang masih belum menyejahterakan rakyat,” tutur Prof. Hadin Muhjad.

“Sudah menjadi tugas semua pihak untuk menyadarkan seluruh komponen bangsa atas ancaman yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Upaya tersebut pertama bermula dari keluarga, sekolah, sekolah lanjutan, dan perguruan tinggi. Kedua, melalui berbagai organisasi kemasyarakatan yang ada, baik oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten, dengan memberikan pemahaman terhadap pentingnya arti peningkatan wawasan kebangsaan di era global,” kata Gubernur Kalimantan Selatan, Drs. H. Rudy Ariffin, MBA.

DPRD Kota Pangkal Pinang, Korem 045/Garuda Jaya Bangka Belitung, Pemerintah Kabupaten Bangka, DPRD Kabupaten Bangka, Museum Timah, Galeri Kain Tenun Cual, Universitas Bangka Belitung, PT. Timah dan Lokasi Penambangan di Pemali, Kabupaten Bangka.

Rombongan SSDN PPRA LI yang berkunjung di Provinsi Kalimantan Selatan melakukan lawatannya ke Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, DPRD Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Selatan, Korem 101/Antasari, Pemerintah Kota Banjarmasin, DPRD Kota Banjarmasin, Pemerintah kabupaten Tabalong dan Lokasi Penambangan PT. Adaro.

Diharapkan dengan pelaksanaan SSDN ini, peserta PPRA LI Lemhannas RI dapat memiliki cakrawala pandang yang komprehensif dan integral tentang kondisi obyektif dari suatu Daerah/Provinsi yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, terutama tentang kearifan lokal, pelaksanaan pembangunan nasional di daerah serta kondisi Ketahanan Nasional Daerah/Provinsi tersebut.

Selain itu, kegiatan ini juga dapat mempertajam kemampuan peserta untuk menemukan isu-isu strategis di daerah, mendapatkan informasi, data dan fakta sebagai bahan kajian kondisi Ketahanan Nasional di daerah dan dapat menyempurnakan pengukuran Ketahanan Nasional di daerah untuk menambah komprehensivitas bahan Seminar.



Menyiapkan Humas untuk Menyongsong Komunitas ASEAN 2015

Berempat di Swissbel-Hotel Harbour Bay Batam, Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas) Pemerintah Pusat yang bekerja sama dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam mengadakan Forum dan *Workshop* Bakohumas Regional Indonesia Barat Tahun 2014. Acara yang berlangsung dari tanggal 25-26 Juni 2014 ini mengusung tema “Kesiapan Humas Pemerintah Profesional dalam Menghadapi Komunitas Asean 2015”.

Biro Humas Settama Lemhannas RI yang juga merupakan salah satu anggota Bakohumas turut serta dalam kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut. Kepala Biro Humas Settama Lemhannas RI Laksma TNI E. Estu Prabowo, M.Sc. dengan didampingi oleh Kasubbag Hubanlem Rohumas Settama Lemhannas RI Letkol Inf Sumurung Pasaribu hadir dalam forum dan *workshop* yang dibuka oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia Tifatul Sembiring.

Dalam sambutannya, Tifatul Sembiring mengatakan bahwa, “Peran Humas sangat penting karena menyangkut tentang baik buruknya kualitas komunikasi publik yang terjadi di masyarakat. Pilihan kata dalam berkomunikasi di media dan di depan publik, akan memberi kesan yang mendalam di benak masyarakat.”

Forum dan *workshop* ini menghadirkan empat pembicara. Pertama adalah Subowo Djoko Widodo selaku Asisten Deputi Koordinasi Kebijakan, Penyusunan Evaluasi Program, dan Pembinaan Integritas SDM Aparatur Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang memberi materi dengan tema “Mewujudkan Humas Profesional melalui Regulasi Undang-undang Aparatur Sipil Negara”.

Sementara pembicara kedua adalah Muslim Basya selaku Dewan Kehormatan Perhumas (Perhimpunan Humas) dengan tema



materi “Peningkatan Kompetensi dan Daya Saing Humas melalui Sertifikasi Profesi Kehumasan”.

Praktisi Komunikasi, Bernadete Risti Damayanti sebagai pembicara ketiga menyampaikan materi dengan tema “Profesi Humas: Tantangan dan Solusinya”. Sedangkan Pembicara terakhir yang juga merupakan praktisi komunikasi, Ermiel H Tabrani, menyampaikan materi “Konsep dan Teknik *Public Speaking*”.

“Dalam menyongsong Komunitas ASEAN 2015, peran Humas menjadi sangat strategis dalam skala lokal, regional, serta internasional. Oleh karena itu, penting sekali bagi humas untuk memahami *blue print* kerjasama ASEAN,” ujar Asisten Ekonomi Pembangunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Syamsul Bahrum.

Menurut Syamsul Bahrum, dengan pemberlakuan Komunitas ASEAN 2015, yang pertama kawasan ASEAN akan menjadi *single market* dan *production base*. “Harus diingat bahwa dalam kerjasama ini Indonesia hanya menjadi basis konsumsi, masyarakat Indonesia harus lebih berperan aktif dalam kegiatan produksi”.

“Kedua, kerja sama ini juga akan menjadikan kawasan ASEAN memiliki nilai kompetitif yang tinggi. Ketiga, pemerataan pembangunan kawasan ASEAN dan keempat, komunitas ASEAN akan menjadikan kawasan ini sebagai kawasan ekonomi global”, lanjutnya.

REDAKSI NEWSLETTER
LEMHANNAS RI

MENGUCAPKAN

“SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 1435 H
MOHON MAAF LAHIR DAN BATIN”

